

PERAN DAN FUNGSI ADMINISTRASI TERHADAP PENGAWASAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KAB. SERANG

Nahla Nabila¹, Billy Tejaarief²

Universitas Bina Bangsa

Email: nahlanabila583@gmail.com¹

Abstrak – Administrasi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada kinerja pengawas sekolah, tetapi juga pada sistem administrasi yang tertib, terstruktur, dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi administrasi dalam menunjang kegiatan pengawasan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan berita daring yang relevan dengan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa administrasi berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pengawasan sekolah. Fungsi administrasi yang optimal mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, menjamin ketercapaian standar pendidikan, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Serang. Namun, masih ditemukan kendala administratif seperti ketidakepatan data, kesalahan penulisan dokumen, dan keterlambatan pelaporan yang dapat memengaruhi kualitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar pengawasan pendidikan dapat berjalan Secara maksimal.

Kata Kunci: Administrasi Pendidikan, Pengawasan SMP, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Mutu Pendidikan, Kabupaten Serang.

Abstract – Administration plays a strategic role in supporting the implementation of educational supervision, particularly at the junior high school level. Effective supervision depends not only on the performance of school supervisors but also on an orderly, structured, and accountable administrative system. This article aims to analyze the roles and functions of administration in supporting the supervision of junior high schools under the Department of Education and Culture of Serang Regency. The method used is a qualitative descriptive study employing document analysis and relevant online news sources related to educational supervision policies and practices. The findings indicate that administration plays an important role in the planning, implementation, reporting, and evaluation of school supervision. Optimal administrative functions can enhance the effectiveness of supervision, ensure the achievement of educational standards, and support the improvement of junior high school education quality in Serang Regency. However, administrative challenges remain, including inaccurate data, writing errors in official documents, and delays in reporting, which may affect the quality of supervision. Therefore, strengthening administrative systems and improving human resource competencies are necessary to ensure effective educational supervision.

Keywords: Educational Administration, Junior High School Supervision, Department Of Education And Culture, Education Quality, Serang Regency.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan langsung dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, diperlukan sistem pengelolaan dan pengawasan yang efektif serta berkelanjutan. Pengawasan pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pembinaan guna memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar, kebijakan, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.(Purwanto, 2019; Sagala, 2018)

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), pengawasan memiliki peran yang sangat penting karena fase ini merupakan tahap transisi peserta didik dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah. Kualitas pengelolaan sekolah, proses pembelajaran, serta administrasi akademik dan nonakademik di tingkat SMP sangat menentukan keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, pengawasan SMP tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengelolaan administrasi sekolah secara menyeluruh.(Mulyasa, 2017; Purwanto, 2019)

Dalam praktiknya, keberhasilan pelaksanaan pengawasan SMP tidak terlepas dari peran administrasi pendidikan. Administrasi berfungsi sebagai sistem pendukung yang mengatur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga evaluasi kegiatan pengawasan. Administrasi yang tertib dan akurat menjadi dasar pengambilan keputusan, penilaian kinerja sekolah, serta perumusan kebijakan tindak lanjut. Tanpa dukungan administrasi yang baik, proses pengawasan berpotensi berjalan tidak optimal dan sulit diukur keberhasilannya.(Purwanto, 2019; Sagala, 2018)

Di tingkat daerah, pelaksanaan pengawasan SMP berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan. Dalam konteks Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap satuan pendidikan SMP, baik negeri maupun swasta. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur administrasi, mulai dari pengelolaan data sekolah, penyusunan jadwal pengawasan, dokumentasi hasil supervisi, hingga penyusunan laporan evaluasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan administratif yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Permasalahan tersebut antara lain ketidaksesuaian data administrasi sekolah, keterlambatan penyampaian laporan, serta kesalahan penulisan dan penggunaan ejaan dalam dokumen resmi dan publikasi daring. Kesalahan administrasi, termasuk kesalahan ejaan, meskipun terlihat sederhana, dapat berdampak pada kredibilitas lembaga, kejelasan informasi, serta efektivitas komunikasi kebijakan pendidikan kepada publik.(Sagala, 2018)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak aktivitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipublikasikan melalui media daring dan portal berita. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat seharusnya tidak hanya akurat secara substansi, tetapi juga benar secara kaidah bahasa. Penggunaan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) menjadi bagian dari kualitas administrasi publik yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, analisis terhadap kesalahan ejaan dalam berita pendidikan menjadi relevan untuk melihat sejauh mana fungsi administrasi dijalankan secara optimal.(kementerian pendidikan, kebudayaan, 2020; Purwanto, 2019; Sagala, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai peran dan fungsi administrasi dalam pengawasan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Selain itu, artikel ini juga menganalisis contoh berita daring terkait kegiatan pengawasan pendidikan dengan menelaah kesalahan ejaan yang terdapat di dalamnya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya

administrasi yang tertib dan berstandar bahasa dalam mendukung pengawasan pendidikan serta peningkatan mutu SMP di Kabupaten Serang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis peran dan fungsi administrasi dalam pelaksanaan pengawasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses administrasi dan praktik pengawasan pendidikan, bukan pada pengukuran statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap beberapa berita daring resmi yang memuat kegiatan pengawasan pendidikan, diperoleh temuan bahwa administrasi memiliki peran yang sangat dominan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Temuan hasil penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama, yaitu perencanaan administrasi, pelaksanaan administrasi, pelaporan administrasi, serta penggunaan bahasa dan ejaan dalam dokumen publik.

1. Peran Administrasi dalam Perencanaan Pengawasan SMP

Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan SMP diawali dengan perencanaan administratif yang meliputi penyusunan jadwal supervisi, penetapan sekolah sasaran, serta pembagian tugas pengawas. Informasi ini tercermin dalam berita daring yang menjelaskan keterlibatan bidang pembinaan SMP dalam mengatur tahapan pengawasan program pendidikan.

2. Peran Administrasi dalam Pelaksanaan Pengawasan

Pada tahap pelaksanaan, administrasi berperan dalam pendataan sekolah, pencatatan hasil supervisi, serta dokumentasi kegiatan pengawasan. Berita daring menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung ke sekolah, pemantauan program, serta evaluasi kegiatan belajar mengajar.

Administrasi yang baik memungkinkan data hasil pengawasan tersimpan secara sistematis dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Akan tetapi, hasil penelitian menemukan bahwa beberapa kegiatan pengawasan yang diberitakan belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme pencatatan dan pengolahan data administrasi.

3. Fungsi Administrasi dalam Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan merupakan salah satu fungsi administrasi yang sangat penting dalam pengawasan pendidikan. Dari hasil analisis berita, diketahui bahwa laporan hasil pengawasan digunakan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut kebijakan pendidikan di tingkat SMP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi merupakan komponen fundamental dalam pelaksanaan pengawasan SMP. Peran administrasi tidak hanya sebatas kegiatan pencatatan, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pendidikan.

Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan teori administrasi pendidikan yang menekankan bahwa administrasi berfungsi sebagai sistem pendukung utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks pengawasan SMP, administrasi yang tertib mampu meningkatkan efektivitas kerja pengawas serta menjamin ketercapaian standar mutu pendidikan.

Namun, temuan mengenai kesalahan ejaan dalam berita daring mengindikasikan bahwa fungsi administrasi belum sepenuhnya dijalankan secara profesional. Bahasa dan ejaan merupakan bagian dari administrasi publik yang mencerminkan kredibilitas lembaga. Kesalahan ejaan yang berulang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

informasi yang disampaikan oleh instansi pendidikan. (kementerian pendidikan, kebudayaan, 2020; Purwanto, 2019; Sagala, 2018)

Selain itu, keterbatasan informasi administratif dalam berita daring menunjukkan perlunya peningkatan transparansi publik. Publikasi yang lebih lengkap dan tertata tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Administrasi berfungsi sebagai sistem pendukung utama dalam seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi kegiatan pengawasan pendidikan. (Purwanto, 2019; Sagala, 2018)

Hasil kajian menunjukkan bahwa administrasi yang tertib dan terstruktur mampu meningkatkan efektivitas pengawasan SMP, menjamin ketercapaian standar pendidikan, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Serang. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala administratif, khususnya dalam hal ketidaktepatan data, keterlambatan pelaporan, serta kesalahan penggunaan ejaan dalam berita daring dan dokumen publik. Kendala tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pengawasan dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, hasil analisis ejaan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) masih ditemukan dalam publikasi daring terkait kegiatan pengawasan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kebahasaan sebagai bagian dari administrasi publik belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2024). Pengawasan Program Pendidikan oleh Dinas Pendidikan di Wilayah Banten. Diakses dari portal berita nasional.
- Arikunto, S. (2013). Dasar-Dasar Supervisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Media Banten. (2025). Dindikbud Kabupaten Serang Pastikan Pengawasan Program Pendidikan SMP Berjalan Optimal. Diakses dari portal berita daring daerah.
- Mulyasa, E. (2017). Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, N. (2019). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sagala, S. (2018). Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Kompas.